



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online
(ePaper)*

SUBJEK

SARANA DAN PRASARANA

Senin, 20 Mei 2024

BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan
2024

Daftar Isi

1. ISU POLITIS DAN EKOLOGIS MENGHAMBAT PENCAPAIAN SDGs AIR BERSIH DAN SANITASI – *Media Online Kompas*
2. GULA-GULA DIGUYUR KE INVESTOR IBU KOTA NEGARA – *Media Online Kontan*
3. PROYEK STRATEGIS NASIONAL MEMBEBANI DUIT NEGARA – *Media Online Kontan*
4. PACU KONEKTIVITAS, TRAYEK TOL LAUT TUMBUH 11% PER TAHUN – *Media Online Investor Daily*

Isu Politis dan Ekologis Menghambat Pencapaian SDGs Air Bersih dan Sanitasi

NUSA DUA, KOMPAS — Perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi tidak sesuai dengan target pada tahun 2030. Oleh sebab itu, penyelenggaraan Forum Air Sedunia ke-10 di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret terhadap masalah itu.

Forum Air Sedunia atau World Water Forum diadakan pertama kali di Maroko pada 1997. Dalam penyelenggaraannya, Dewan Air Sedunia (World Water Council) bekerja sama dengan negara yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Forum kali ini diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, pada 18-25 Mei 2024.

Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat, Forum Air Sedunia ke-10 penting karena isu sanitasi dan air bersih menunjukkan perkembangan yang serius. "SDGs (Sustainable Development Goals) ke-6 yang terkait jaminan ketersediaan serta pelaksanaan air dan sanitasi bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan tidak *on track*. Saya ulang, tidak *on track*," ujarnya saat konferensi pers di Nusa Dua, Minggu (19/5/2024).

Tersendatnya perkembangan capaian SDGs ke-6 itu mengemuka dalam dokumen berjudul "The United Nations World

Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace". Dokumen itu menyatakan, target-target SDGs ke-6 tampak tidak sesuai jalur. Per 2022, sebanyak 2,2 miliar warga dunia tidak mendapatkan akses air minum aman. Sebanyak 4 dari 5 penduduk di daerah terpencil secara global kekurangan layanan dasar air minum. Jumlah penduduk dunia yang kekurangan akses pada layanan sanitasi mencapai 3,5 miliar.

Pencapaian target-target SDGs menjadi nadi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2015. Laman resmi UN-Water SDG 6 Data Portal menunjukkan, proporsi penduduk dunia pengguna layanan sanitasi aman mencapai 57 persen. Tingkat penerapan pengelolaan sumber daya air terintegrasi di skala global sebesar 54 persen. Cakupan limbah air domestik dunia yang diolah secara aman mencapai 58 persen.

Secara umum pencapaian SDGs negara-negara berkembang dengan tenggat tahun 2030 sekitar 12 persen pada 2023. "Ini tantangan bersama. Namun, Indonesia termasuk negara yang cukup maju dalam pencapaian SDGs. Pada 2023, Indonesia mencapai lebih dari angka 66 persen," ujar Tri.

Oleh sebab itu, Forum Air

Sedunia di Indonesia diharapkan dapat membahas isu penting tersebut melalui sejumlah pertemuan strategis.

Empat pokok

Tri menyebutkan, dalam Forum Air Sedunia ke-10, terdapat empat pokok yang ditargetkan Indonesia. Pertama, kesepakatan internasional untuk menetapkan Hari Danau Sedunia karena perhatian terhadap pengelolaan danau relatif sedikit. Kedua, kesepakatan membentuk *center of excellence* isu sumber daya air beserta perubahan iklim.

Pokok ketiga mengenai pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi, khususnya di pulau-pulau kecil. Keempat, kesepakatan terhadap lebih dari 100 proyek di bidang air untuk dieksekusi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, terdapat 120 proyek strategis terkait air bersih dan sanitasi.

"Nilai proyek-proyek ini sekitar 9,4 miliar dollar AS. Proyek-proyek tersebut salah satunya menindaklanjuti inisiatif Indonesia dalam pertemuan G20 pada tahun 2022 terkait G20 Bali Global Blended Finance Alliance yang akan mendukung pendanaan aksi iklim, termasuk menghadapi krisis air," ujar Luhut melalui siaran pers, Jumat (17/5). (JUD)

Gula-Gula Diguyur ke Investor Ibu Kota Negara

Pemerintah menggelontorkan sederet insentif pajak untuk membangun IKN Nusantara

Siti Masitoh,
Dendi Siswanto

JAKARTA. Pemerintah resmi meneban sejumlah insentif pajak khusus di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini untuk mengundang investor agar mau menanamkan modalnya di ibu kota negara yang baru tersebut.

Daftar gula-gula untuk investor tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 28/2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani ini berlaku sejak diundangkan yakni pada 16 Mei 2024.

Lewat beleid itu, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Setidaknya ada sembilan insentif PPh yang ditawarkan pemerintah untuk investor atau pelaku usaha yang menanamkan modalnya atau mendirikan usahanya di IKN (lihat tabel).

Beberapa di antaranya, pertama, *tax holiday* bagi penanaman modal. Fasilitas pengurangan PPh badan ini diberikan 100% dari jumlah PPh badan tertuang, yang bisa mu-

lai dimanfaatkan sejak tahun pajak saat mulai beroperasi komersial. Penerima fasilitas ini berupa wajib pajak badan dalam negeri yang menanamkan modal dengan nilai paling sedikit Rp 10 miliar.

Kedua, fasilitas PPh di *financial center* IKN. Fasilitas ini berupa pengurangan PPh badan yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *financial center* IKN sebesar 100% dan 85% dari jumlah PPh badan. Ketiga, pengurangan PPh badan atas pendirian atau pemindahan kantor pusat dan atau regional. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh subjek pajak luar negeri dan dalam negeri. Fasilitas insentif PPh badan ini diberikan sebesar 100% dari jumlah pajak PPh badan yang terhutang selama 10 tahun pajak.

Keempat, *Superdeduction* vokasi. Fasilitas penghasilan bruto diberikan paling tinggi sebesar 250% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran.

Kelima, PPh Pasal 21 final ditanggung pemerintah (DTP). Keenam, PPh final 0% usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ketujuh, pengurangan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Kepastian bisnis

Sementara insentif tak dipungut PPN dan pengecualian PPnBM diberikan atas penyerahan barang kena pajak bersifat strategis meliputi bangunan rumah tapak, satuan rumah susun, hingga kantor dan penyerahan kendaraan bermotor yang bermotor polisi di IKN dan memakai baterai *electric vehicles* yang diproduksi di dalam negeri.

Insentif Pajak di Ibu Kota Nusantara

Insentif PPH

- Insentif *tax holiday* penanaman modal.
- Fasilitas PPh di *financial center* IKN.
- Pengurangan PPh badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat.
- Superdeduction* vokasi.
- Superdeduction* litbang.
- Superdeduction* sumbangan fasilitas umum di IKN.
- PPh Pasal 21 final ditanggung pemerintah.
- PPh Final 0% UMKM
- Pengurangan PPh atas pengalihan hak atas tanah/bangunan.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menilai, pemberian insentif hanya faktor lain yang dijadikan pertimbangan investor. Sebab, faktor utamanya adalah kepastian hukum seperti status tanah dan ketersediaan sarana dan prasarana. Bahkan yang lebih penting lagi adalah aktivitas ekonomi di IKN. "Berapa banyak penduduk yang tinggal, berapa besar pasar dan *demand* yang sudah ada, berapa besar potensi bisnisnya dalam

kurun waktu tertentu. Ini menjadi yang paling menarik bagi pengusaha dalam berinvestasi," kata dia, kemarin.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjaning menilai, fasilitas ini adalah aspirasi yang diharapkan pelaku usaha. "Kami ingin agar berbagai kekhawatiran seperti masalah pertanahan bisa *clear*. Seperti tata ruang peruntukan sebuah lahan harus jelas, hak kepemilikan, hak pakai, dan lainnya," kata dia.

Insentif Tidak Dipungut PPN dan Pengecualian PPnBM

- Penyerahan barang kena pajak bersifat strategis meliputi bangunan berupa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan/atau gudang yang diserahkan kepada orang pribadi, badan, dan/atau Kementerian/lembaga tertentu.
- Penyerahan kendaraan bermotor yang bermotor polisi di IKN yang menggunakan teknologi baterai *electric vehicles* yang diproduksi di dalam negeri.

- Barang kena pajak yang bersumber dari hibah.
- Jasa kena pajak berupa sewa rumah tapak, rumah susun, kantor, pusat perbelanjaan dan/atau gudang.
- Jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur, pembangkit listrik energi baru terbarukan, sistem penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan air, jaringan energi, instalasi pengolahan sampah, gedung penitipan anak, gedung prasekolah, gedung pendidikan, gedung pemerintahan, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit.

Sumber: PMK No. 28 Tahun 2024

Proyek Strategis Nasional Membebani Duit Negara

Pemerintah menambah 16 daftar proyek strategis nasional (PSN) pada tahun ini

Vendy Yhulia Susanto,
Lailatul Anisah

JAKARTA. Pemerintah terus menambah proyek strategis nasional (PSN). Tercatat ada dua proyek baru sehingga jumlah PSN menjadi 16 proyek pada tahun ini. Salah satunya adalah proyek sistem pembayaran jalan tol nontunai nirsentuh atau *multi lane free flow* (MLFF).

Pt Deputy Bidang Koordinator Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwi Moegiarso mengatakan proyek yang masuk daftar PSN baru ini ditargetkan rampung pada 2029. "Sementara tahun 2024-2025, ditargetkan untuk memulai pengujian secara terbatas," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Ia menegaskan, proyek MLFF menjadi PSN karena diusulkan langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui surat rekomendasi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sebagai tindak lanjut, Kemenko Perekonomian tengah mempercepat koor-

dinasi dengan lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan serta percepatan proses kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Triono Junoasmono bilang alasan MLFF masuk PSN karena menjadi salah satu program strategis pemerintah yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Adapun MLFF telah dilakukan uji coba beberapa waktu lalu di Bali. Dari hasil uji coba, Kementerian PUPR tengah menyempurnakan, misalnya terkait standar operasional prosedur, teknis dan hal terkait lainnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai daftar PSN baru ini akan menambah beban fiskal di masa pemerintahan anyar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Apalagi, Prabowo juga memiliki program baru yang membutuhkan anggaran besar, seperti makan siang gratis. "Apabila mengakomodasi

kebutuhan pemerintahan lama, tentu anggaran akan bertambah dan penambahan anggaran ini sangat besar akan menambah defisit anggaran," kata Rendy.

Ia mengingatkan berdasarkan undang-undang ditetapkan

kan defisit anggaran maksimal hanya boleh 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain, ia menilai penerimaan pajak saat ini belum mampu memenuhi semua kebutuhan belanja pemerintah ke depan termasuk mengako-

modasi beberapa PSN yang menjadi proyek warisan pemerintahan saat ini. "Ongkos pembiayaan yang lebih mahal sudah pasti berdampak ke fiskal," tutur Rendy.

Hlm: 14 - Kolom: Nasional

Daftar 16 Proyek Strategis Nasional

Nama Proyek	Lokasi	Nilai Proyek
Proyek PIK 2	Tangerang, Banten	Rp 65 triliun
Kawasan Industri Wiraraja	Batam, Kepri	Rp 226 triliun
North Hub Development Project	Kutai Kartanegara	US\$ 11,83 miliar
Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate	Sulteng	Rp 225 triliun
Kawasan Industrial Patimban	Subang, Jabar	Rp 169,5 triliun
Kawasan Industri Indonesia Giga	Kolaka Utara, Sultra	Rp 109 triliun
Kawasan Industri Kolaka	Kolaka Utara, Sultra	Rp 150 triliun
Kawasan Industri ASPIRE Stargate	Konawe, Sultra	Rp 2,89 triliun
Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya	Jawa Timur	Rp 50 triliun
Kawasan Industri Neo Energy Morowali	Morowali, Sulteng	Rp 150 triliun
Kawasan Pengembangan Terpadu BSD	Tangerang, Banten	Rp 18,54 triliun
Pengembangan Kawasan Industri Toapaya	Bintan, Kepri	Rp 120,5 triliun
Pengembangan Jalan Tol Ir Wiryoto Wiyono	Jakarta	Rp 15,8 triliun
Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung	Bandung, Jabar	Rp 7,83 triliun
Program Multi Lane Free Flow	Nasional	Rp 4,49 triliun
Program peningkatan konektivitas udara	Nasional	-

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

INVESTOR DAILY

INDONESIA
SENIN, 20 MEI 2024

Pacu Konektivitas, Trayek Tol Laut Tumbuh 11% Per Tahun

JAKARTA, ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakomodasi arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan infrastruktur transportasi dalam sepuluh tahun pemerintahan dengan mewujudkan infrastruktur transportasi berkelanjutan.

Oleh Ichan Amin

Proyek-proyek tersebut meliputi peningkatan pembangunan bandara dan sektor penyeberangan, pembangunan terminal pelabuhan hingga stasiun kereta api.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan sektor transportasi menunjukkan angka pembangunan infrastruktur dan transportasi yang relatif meningkat.

Pembangunan tersebut secara umum meliputi pembangunan dan revitalisasi terminal tipe A yang lebih luas dan modern, pengembangan bandara serta pelabuhan yang mampu menampung volume yang lebih besar, termasuk pembaruan sistem transportasi massal seperti bus listrik, MRT, LRT, serta Kereta Api Cepat.

"Kita lihat 10 tahun terakhir ini terjadi serangkaian proses pembangunan transportasi di perkotaan dan seluruh Indonesia. Semua relatif naik. Laut paling tinggi, lalu sektor perkeretaapian, bandara, serta penyeberangan," kata Budi Karya dalam "Diskusi Publik Satu Dekade Pembangunan Infrastruktur Transportasi" di Jakarta, belum lama ini.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, di sektor transportasi darat telah dilakukan sebanyak 85 pengembangan pelabuhan penyeberangan, 65 pembangunan dermaga penyeberangan, 12 pengembangan pelabuhan penyeberangan baru serta enam kota metropolitan dengan sistem angkutan massal perkotaan.

Pada sektor perkeretaapian, telah dilakukan pembangunan sepanjang 10.709 kilometer (km) jalur kereta api, 58 lokasi pembangunan dan modernisasi stasiun kereta api, pembangunan LRT, MRT, kereta

Target RPJMN Kemenhub		
Arah Kebijakan	RPJMN 2015-2019	RPJMN 2020-2024
Peningkatan Konektivitas Nasional	- Membangun 20.00 km jalan baru	- Pembangunan kereta api kecepatan tinggi
	- Membangun dan Merenovasi 10 pelabuhan baru	- Pembangunan kereta api Makassar-Parepare
	- Membangun dan merenovasi 10 bandara baru	- Pembangunan jalan tol dan non-tol pada lintas utama
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Transportasi	- Pengembangan BRT di 29 kota besar	- Integrasi jaringan pelabuhan dengan 7 pelabuhan utama
	- Pengembangan MRT di Jabodetabek	- Pengembangan program angkutan umum massal perkotaan
	- Pengembangan monorel di Surabaya dan Bandung	- Pengembangan otoritas transportasi wilayah metropolitan
Peningkatan Keselamatan Transportasi	- Pengembangan sistem manajemen transportasi perkotaan (ATCS/ITS)	- Pengembangan keselamatan dan keamanan transportasi melalui pendekatan sistem yang berkeselamatan (safe system approach)
	- Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda angkutan umum	- Perencanaan berbasis data dan riset untuk meningkatkan keselamatan transportasi
	- Penerapan skema pembatas lalu lintas di kota	- Pengembangan otoritas transportasi wilayah metropolitan
Pengembangan Transportasi Perkotaan	- Pengembangan program angkutan umum massal perkotaan	- Pembangunan keselamatan dan keamanan transportasi melalui pendekatan sistem yang berkeselamatan (safe system approach)
	- Perluasan program hibah jalan daerah dan pembangunan jalan akses menuju simpul transportasi	- Perencanaan berbasis data dan riset untuk meningkatkan keselamatan transportasi
	- Meningkatkan aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan	

Sumber: Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

cepat Whoosh, kereta api trans Sulawesi dan kereta perintis.

Sedangkan, pada sektor transportasi laut, telah dibangun 39 trayek tol laut, 51 proyek pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi fasilitas pelabuhan. Adapun, di sektor udara Kemenhub telah membuka sebanyak 41 rute jembatan udara dan pemangangan 26 bandar udara baru.

Terkait konektivitas, Menhub Budi Karya menjelaskan, pada 10 tahun ke belakang terus dibangun konektivitas tol laut dan angkutan perintis. Saat ini, tol laut memiliki 191 trayek dengan pertumbuhan 11% per tahun.

Adapun total muatan kontainer berangkat berjumlah 84.609 ton dengan muatan kontainer balik berjumlah 26.362 ton. Sedangkan total muatan non-kontainer berangkat berjumlah 530.403 teus dengan muatan non-kontainer balik berjumlah 27.551 TEUS.

Pada angkutan kapal perintis, selama 10 tahun ini total trayek yang dimiliki mencapai 1.070 dengan pertumbuhan 3% per tahun. Total penumpang berjumlah 5.901.027 den-

gan pertumbuhan 13% per tahun. Sementara itu, jumlah muatan barang mencapai 1.058.759.

Sedangkan pada angkutan udara perintis, total terdapat 2.828 rute penumpang, 278 rute kargo, serta 10 rute udara kargo. Sedangkan pada angkutan perkeretaapian perintis telah beroperasi 9 kereta dengan jumlah penumpang yang terus meningkat tiap tahunnya.

"Ada angkutan udara perintis yang kita lakukan dengan intensif. Perkembangannya cukup besar. Ada juga kereta api perintis khususnya yang dapat digunakan masyarakat perkotaan, dan kita sedang melakukan keperintisan dengan membuka kereta api di Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan. Jadi kereta api tidak antarlau saja tapi aglomerasi juga menjadi penting," ujar Menhub.

Perlu Jangkau Wilayah Lain

Menhub Budi Karya menambahkan, pihaknya berharap pembangunan infrastruktur transportasi bisa dilanjutkan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurut dia, langkah nyata tersebut diwujudkan lewat

kereta cepat Whoosh, MRT dan LRT.

"Kami sangat massif tentu saja. Karena arahan presiden juga meminta supaya infrastruktur transportasi yang kita bangun bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelas dia.

Sementara itu, akademisi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setiowarno mengatakan, satu dekade ini sektor transportasi diakui massif. Namun begitu, perlu perimbangan yang lebih luas menjangkau masyarakat Indonesia di wilayah lain.

"Jangan hanya fisik infrastruktur saja yang harus dibangun. Tapi juga keberlanjutannya, karena kalau hanya fisik, tapi yang mengoperasikan tidak ada bagaimana? Atau ada yang mengoperasikan tapi tidak menguntungkan bagaimana? Sia-sia juga," ucap dia.

Menurut Djoko, pembangunan infrastruktur dan transportasi yang berkelanjutan harus memiliki efek jangka panjang. Djoko beralasan, sektor transportasi harus dianggap sebagai salah satu kebutuhan utama dan dasar. "Di negara maju, sektor transportasi vital seperti ini tidak memikirkan untung,

Justru sebaliknya, disub-sidi untuk kepentingan sumber daya penghidupan masyarakat," ungkapnya.

Karena itu, Djoko menambahkan, pembangunan transportasi yang merata juga tidak hanya didukung infrastruktur melalui sarana dan prasarannya. Namun juga harus didukung oleh pengelolaan subsidi langsung, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat.

"Kalau kita bandingkan tingkat transportasi di Papua misalnya, meski tertinggal, tapi harus dipikirkan. Misalnya dengan menyediakan bus jika prasarana jalannya tersedia. Kalau belum, jalan masih rusak ya tarifnya harus disubsidi," pungkas Djoko.

Otoritas Transportasi

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Tora Damantoro mengatakan, penyelesaian pembangunan sektor transportasi yang menjangkau kesesuaian antara pusat dan daerah harus bisa dijabarkan melalui kewenangan yang lebih besar melalui otoritas transportasi. Tora memisahkan pada pengembangan MRT Jabodetabek jangka panjang, konektivitasnya membutuhkan kewenangan pusat dan daerah.

"Makanya harus ada otoritas yang berwenang, melalui otoritas transportasi dan menjangkau semua moda angkutan," ungkap Tora.

Menurut dia, dibutuhkan otoritas transportasi pada wilayah metropolitan yang menghubungkan wilayah utama dan penyangga (buffer) sehingga harus ada peran sentral otoritas yang lebih kuat.

"Karena itu butuh banyak dukungan misalnya untuk MRT, jalan akses menuju simpul transportasi dan angkutan feeder bisa berupa bus dan angkutan seperti yang dilakukan Pemda DKI melalui Jak Lingko," tutupnya.